

## **FENOMENA VARIABEL MAKRO EKONOMI DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT**

**Marthen Anthon Pentury**

Dosen STIA Asy-Syafi'Iyah Fakfak, Papua Barat

***Abstract.** Poverty in Indonesia is becoming a national problem and the various programs and policies has been done to alleviate poverty but less on target. Many factors causes poverty that can happen, several factors such as economic growth, government capital expenditure, and the unemployment rate is high enough. The aim of this study is to see the phenomenon of regional macroeconomic variables and their effects on the level of poverty in the District of the consortium in the period 2003-2012. Multiple linear regression analysis model with OLS (ordinary least squares) used in this study will be preceded by test data and test the assumption of normality of classical and statistical tests (t-test and F-test) using eviews software-7. Estimation results individually, only the economic growth variables significant at a 5% , while variable government capital expenditure and open unemployment was not significant. In simultaneous exactly three variables (PDRB, BM , and PT) and a significant effect on the level of poverty in the District of the consortium, in 2003-2012.*

***Keyword:** economic growth, capital expenditures, open unemployment, poverty.*

### **PENDAHULUAN**

Dewasa ini, hampir semua negara di dunia tengah bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan. Kemajuan ekonomi memang merupakan komponen utama pembangunan, tetapi itu bukan satu-satunya komponen karena pada akhirnya, proses pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan materi dan aspek-aspek keuangan dari kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi atas sistem ekonomi maupun sistem sosial secara keseluruhan (*Todaro dan Smith, 2006:124*)

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari sekian aspek dan atau dimensi pembangunan yang bertujuan untuk bagaimana meningkatkan pemenuhan kebutuhan umat manusia melalui peran serta pemerintah dan swasta dengan memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya alam yang sifatnya terbatas jika tidak dikelola secara baik dan benar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik bagi masyarakat di perkotaan maupun perdesaan secara berkeadilan.

Indikator kesejahteraan masyarakat bagi setiap negara/daerah sangatlah berbeda dan hal itu identik dengan kepemilikan segala potensi ekonomi yang memungkinkan negara atau daerah itu bisa berkembang maju melalui begitu banyak penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi penduduknya. Jika minimnya kesempatan penduduk untuk bekerja dan memicu tingginya angka pengangguran, maka tentunya kesejahteraan mereka juga tidak akan bisa ditingkatkan dengan pendapatan sebagai ukuran tinggi/rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Idealnya, suatu negara/daerah dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemerintahan harus bertanggung jawab atas ketersediaan segala fasilitas guna pemenuhan kebutuhan rakyatnya sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal ini cukup beralasan karena salah satu tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan ide desentralisasinya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah (*Bratakusumah dan Solihin, 2002:32*).

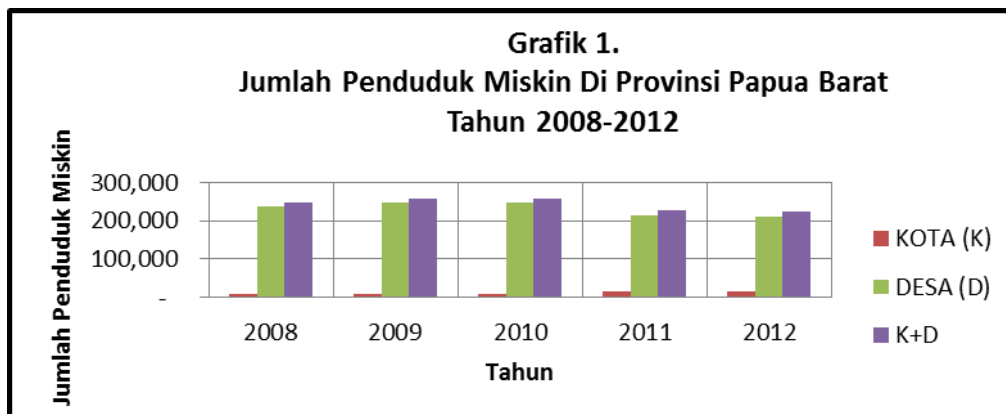
Namun, setelah kurang lebih tiga belas tahun (sejak 1 Januari 2001) pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, tujuan dari peletakan kewenangan dalam kerangka otonomi daerah itu agak sulit untuk dapat diwujudkan karena hingga saat ini tingkat kemiskinan sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat, jumlahnya cenderung fluktuatif dan terus menjadi permasalahan pembangunan.

Secara teoritis, pada umumnya kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Selain itu, kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu ; pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. (*Kuncoro, 2006 ; 111-112*)

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dan besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Garis kemiskinan lain yang paling dikenal adalah garis kemiskinan Profesor Sajogyo, yang dalam studi selama bertahun-tahun menggunakan suatu garis kemiskinan yang didasarkan atas harga beras, dimana versi Sajogyo adalah nilai rupiah yang setara dengan 20 Kg beras untuk perdesaan dan 30 Kg beras untuk perkotaan (*Kuncoro, 2006, 115-118*).

Terlepas dari kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh BPS maupun Sajogyo dalam segi metodologi pengukuran standar kebutuhan minimum, maka tingkat kemiskinan menurut pengamatan penulis di Provinsi Papua Barat antara tahun 2008-2012, ternyata bahwa masih banyak penduduk miskin yang dihitung berdasarkan

kemampuan mereka untuk memenuhi standar hidup minimum dan rata-rata masih berada di bawah garis kemiskinan sebagaimana terlihat pada grafik 1 berikut ini :



Sumber : Berita Resmi Statistik Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

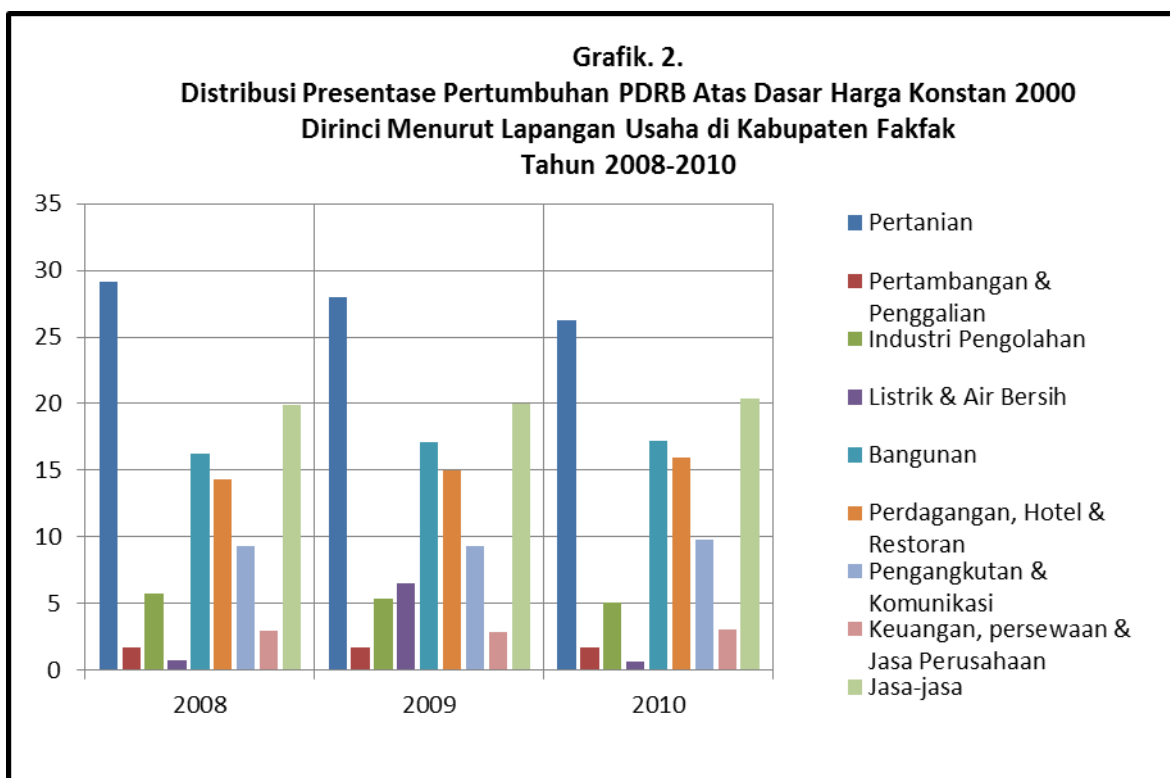
Berdasarkan data pada grafik 1 diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat (sudah termasuk Kabupaten Fakfak) yang dirinci menurut wilayah/daerah cenderung mengalami penurunan bahkan terjadi perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dengan perdesaan dan justru jumlah penduduk miskin terbesar adalah di daerah perdesaan. Data diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin terkecil adalah di daerah perkotaan yakni sebanyak 8.550 orang sedangkan jumlah penduduk miskin terbesar di daerah perdesaan adalah juga pada 2009, yakni sebanyak 248.290 orang, begitupula jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan yang banyak jumlahnya adalah di tahun 2009 pula yaitu sebanyak 256.480 orang.

Menurut *Hardiman dan Midgley (1982)* dalam *Kuncoro (2006;119)* mengatakan bahwa, salah satu penyebab kemiskinan adalah penduduk negara/daerah tersebut hanya menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten, metode produksi yang tradisional dan seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa proses pembangunan pada negara/daerah tersebut diatas belum mampu untuk menciptakan peralihan struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian) ke sektor industri pengolahan (sektor sekunder).

Mencermati kondisi diatas, maka pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*Siregar dan Wahyuniarti, 2008*).

Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang merupakan bagian integral dari pemerintahan Provinsi Papua Barat, selama ini merasa bangga atas keberhasilan pembangunan yang telah mereka capai namun ironisnya kebanggaan itu hanya dilihat sebatas fisik bangunan maupun begitu banyak proyek pembangunan yang dilakukan dan

sama sekali kurang menyentuh kepentingan masyarakat umum. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan daerah hanya menilai aspek kuantitasnya saja tanpa memperhatikan dengan serius aspek kualitas dari pada sebuah proses pembangunan, dimana faktanya sebagaimana terlihat pada grafik 2 dibawah ini:



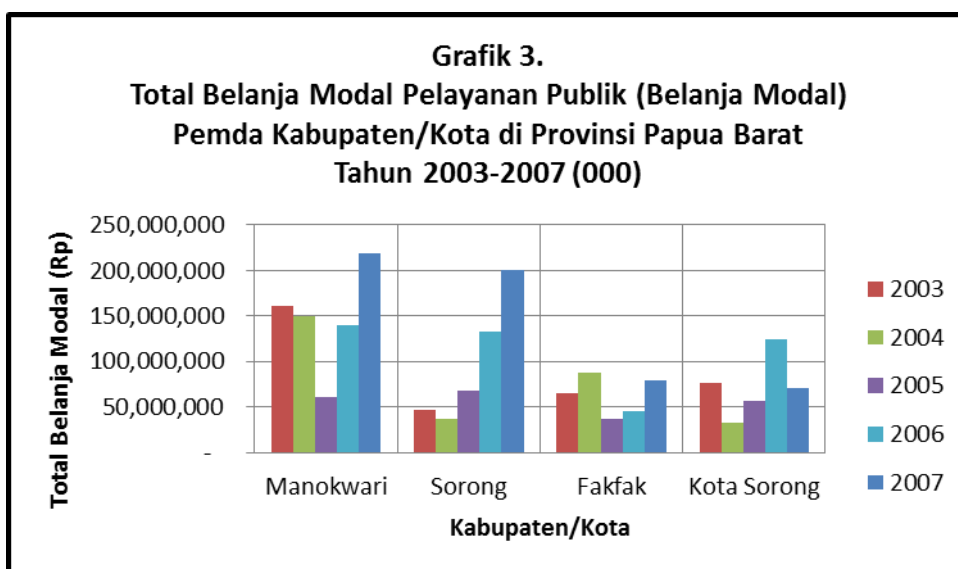
Sumber : Fakfak Dalam Angka 2011, BPS Kabupaten Fakfak.

Sesuai data pada grafik 2 sebelumnya, terlihat bahwa struktur perekonomian daerah Kabupaten Fakfak pada tahun 2008-2010 masih tetap didominasi oleh sektor pertanian (sektor primer) dan bukan sektor industri/pengolahan (sektor sekunder) sebagaimana yang disampaikan oleh Hardiman & Midgley. Justru data diatas menunjukkan tren yang menurun, baik itu untuk sektor pertanian maupun sektor industri, dimana riilnya presentase terbesar ada pada lapangan usaha/sektor pertanian yakni berkisar antara 26,22-29,16% sedangkan yang paling terendah adalah sektor listrik & air bersih yaitu 0,59-070% namun urutan kedua terbesar adalah sektor jasa-jasa, yakni berkisar antara 19,87-20,42%. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa proses pembangunan di Kabupaten Fakfak belum berhasil keluar dari perangkap kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi dengan proksi PDRB sebagai indikator utama belum menunjukkan pergeseran struktur perekonomian yang signifikan.

Pada sisi yang lain, masalah pertumbuhan ekonomi daerah yang belum menunjukkan perkembangan dan pergeseran struktur ekonomi yang cukup berarti bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Fakfak, maka sangat diperlukan berbagai upaya pembangunan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut.

Usaha yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran belanja modal. Peningkatan belanja modal dapat memberi pengaruh yang positif bagi penurunan jumlah penduduk miskin di suatu daerah, karena ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan (Iskandar dan Zikriah, 2009 ; 2)

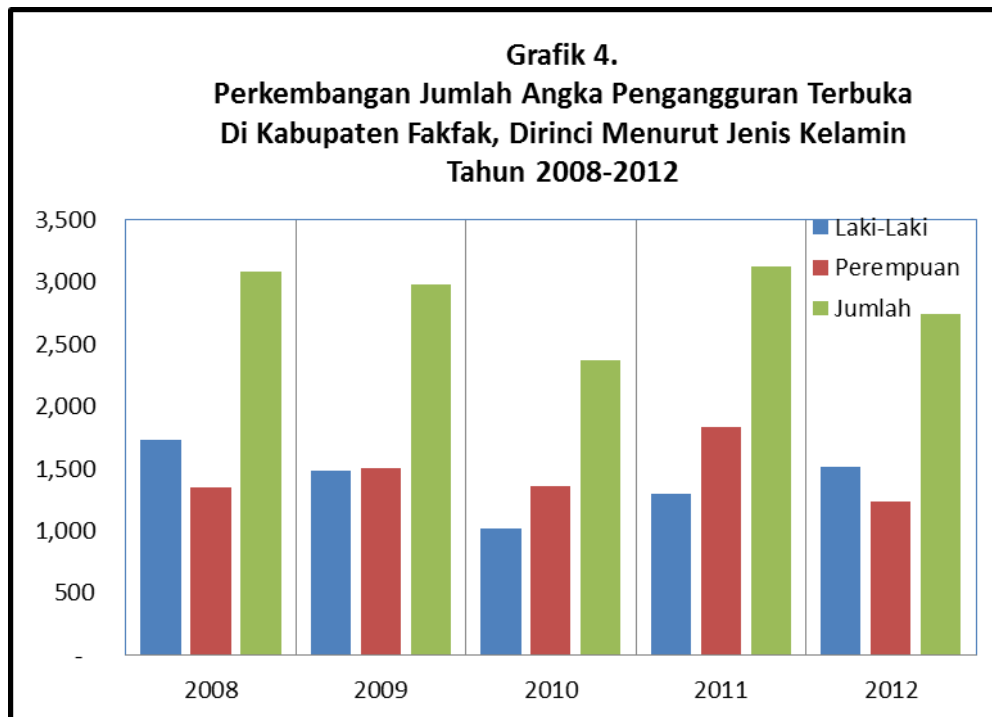
Belanja Modal pembangunan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, sebagaimana yang dikatakan oleh *Mardiasmo (2002 ; 186)*, yakni bagian belanja pelayanan publik yang dialokasikan atau digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Melihat data yang dirilis oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Fakfak maupun BPS Provinsi Papua Barat serta BPS Kabupaten Fakfak, terlihat cukup banyak perbedaan tapi sesuatu yang pasti, total belanja modal Kabupaten Fakfak jauh lebih kecil/rendah besaran anggarannya jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Papua Barat, Tahun 2003-2007, seperti terlihat pada grafik 3 berikut ini :



Sumber : BPS Kabupaten Fakfak (data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa total belanja modal pelayanan publik dari tahun 2003 s/d 2007 lebih kecil dari total belanja modal Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Papua Barat yang hanya berkisar antara Rp. 37 Milyar s/d Rp. 87 Milyar dan yang paling terbesar total alokasi belanja modal adalah Kabupaten Manokwari, yakni berkisar antara Rp. 60 Milyar s/d Rp. 218 Milyar. Hal ini terjadi karena total belanja/pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Fakfak lebih besar/tinggi hanya untuk belanja pegawai. Dampaknya kurang bermanfaat terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) khususnya bagi pergerakan sektor-sektor ekonomi potensial yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Fakfak.

Selain itu, keadaan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal pelayanan publik di Kabupaten Fakfak justru sangat berbeda dengan jumlah angka pengangguran di Kabupaten Fakfak karena data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mengalami penurunan drastis, baik itu untuk jumlah pengangguran berdasarkan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan jumlah angka pengangguran di Kabupaten Fakfak, dapat dilihat pada grafik 4, berikut ini:



Sumber : Fakfak Dalam Angka Tahun 2009-2013 (data diolah)

Pengangguran terbuka dalam penelitian ini, adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja (BPS, 2010). Untuk lima tahun terakhir jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Fakfak cukup fluktuatif dengan kecenderungan arahnya terjadi penurunan, yakni dari 3.081 orang di tahun 2008, turun menjadi 2.744 orang di tahun 2012. Kemudian rata-rata jumlah pengangguran dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dari jumlah pengangguran laki-laki.

Mencermati uraian dan data diatas, maka inilah yang penulis maksud dengan fenomena variabel makro ekonomi daerah di Kabupaten Fakfak, artinya bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seharusnya menghasilkan kinerja pembangunan yang semakin baik namun yang terjadi justru sebaliknya, yakni dari variabel makro ekonomi yang dicapai, dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pengeluaran pemerintah (belanja modal) yang mengalami peningkatan, ternyata belum sepenuhnya mengatasi permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain

pengangguran yang cenderung berfluktuasi dan kemiskinan yang relatif masih tinggi untuk ukuran Kabupaten Fakfak.

Dengan demikian, asumsinya adalah jika pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berupa belanja modal meningkat akan berdampak pada meningkat pula kesempatan kerja atau tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat sehingga angka pengangguran bisa di kurangi jumlahnya dan pada akhirnya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dan atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Fakfak secara cepat dan tidak fluktuatif, namun yang terjadi justru lain sebagaimana bisa dilihat dari pergerakan data-data yang tersaji sebelumnya. Hal ini juga sekaligus menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yakni melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Fakfak.

Sejalan dengan tujuan tersebut maka rumusan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H<sub>0</sub> Secara parsial/simultan, tidak ada pengaruh PDRB, BM, dan PT terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Fakfak, tahun 2003-2012.
- H<sub>a</sub> Secara parsial/simultan, terdapat pengaruh PDRB, BM, dan PT terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Fakfak, tahun 2003-2012.

## **METODE**

### **Data dan Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data runtun waktu atau data time series, yakni periode tahun 2003 s/d 2012 (10 tahun), dimana data yang dikumpulkan berupa data tentang tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin berdasarkan ukuran/kriteria BPS, data pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan jumlah pengangguran. Kemudian data yang diperoleh penulis berasal dari berbagai sumber, yakni dari Kantor BPS (pusat, provinsi, kabupaten fakfak) dan berbagai media/situs *online* yang menyediakan data sesuai variabel yang digunakan oleh penulis.

### **Variabel Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian dan kebutuhan alat analisis yang nantinya digunakan oleh penulis, maka ada dua jenis variabel yang digunakan, yakni variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independen variable*). Tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat dan ada tiga variabel bebas, yakni pertumbuhan ekonomi dengan proksi PDRB, pengeluaran daerah berupa total belanja modal untuk kepentingan pelayanan publik, dan jumlah angka pengangguran terbuka.

### **Alat Analisis**

Untuk kepentingan analisis, penelitian ini menggunakan alat analisis atau model Regresi Linier Berganda (*multiple linear regression model*). Model regresi ini

digunakan untuk melihat secara simultan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian untuk mendapatkan model regresi linier berganda dapat diperoleh dengan melakukan estimasi terhadap parameter-parameternya menggunakan metode tertentu. Adapun metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linier berganda tersebut diatas, digunakan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square/OLS (*Kutner, Nachtsheim, dan Neter, 2004*).

Dengan menggunakan software *eviews-7*, akan dilakukan uji normalitas data maupun uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil estimasi model regresi berganda yang valid, baik dan benar serta mampu menjawab substansi permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya bentuk umum regresi linier berganda menurut *Widarjono (2007 ; 17 dan 63)*, dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + e_i \dots\dots\dots (1)$$

Namun dalam penelitian ini, penulis akan membahas model regresi linier berganda dengan hanya tiga variabel independen (variabel bebas) yang disesuaikan dengan judul penelitian, maka model (1) diatas dapat di modifikasi sebagai berikut:

$$TKMS_t = \beta_0 + \beta_1 PDRB_t + \beta_2 BM_t + \beta_3 PT_t + e_t \dots\dots\dots (2)$$

Dimana, TKMS adalah tingkat kemiskinan, PDRB adalah merupakan proksi dari pertumbuhan ekonomi, BM adalah belanja modal pelayanan publik pemerintah daerah Kabupaten Fakfak, dan PT adalah jumlah pengangguran terbuka (open unemployment). Kemudian  $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$  adalah intercept/konstanta dan nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas, kemudian subcrib  $t$  menunjukkan periode tahun pengamatan. Model persamaan (2) di atas digunakan untuk mengukur variabel bebas yang secara serentak/simultan berpengaruh terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji F (simultan). Kemudian untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh semua variabel independen, digunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu ingin melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Fakfak pada periode tahun 2003-2012, maka setelah melalui proses uji normalitas data dan uji asumsi klasik, diperoleh hasil estimasi model regresi linier berganda yang terlihat pada tabel 5.

Berdasarkan informasi/laporan tentang hasil estimasi yang menggunakan *software eviews-7* untuk model regresi linier berganda sebagaimana terlihat pada tabel 5 diatas, dapat dijelaskan bahwa secara parsial, hanya variabel PDRB yang signifikan pada  $\alpha$  5% (0,05), dimana nilai t-hitung untuk PDRB sebesar 2,767 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,447. Sedangkan variabel BM dan PT tidak signifikan karena nilai t-hitung kedua variabel tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel, yakni 1,191 dan 1,878. Pembuktian lain adalah dilihat dari nilai Prob. setiap variabel bebas dan hanya prob.



PDRB yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa hanya variabel PDRB yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, kemudian variabel BM dan PT tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Fakfak, periode tahun 2003-2012.

Tabel 5  
Ringkasan Output Eviews Model Regresi

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
Intercep	29.805,46	11,57192	0,0000
PDRB	-1,10	-2,767834	0,0325
BM	-7,19	-1,191169	0,2786
PT	0,698232	1,878195	0,1094
R-Squared	0,922529	F-Statistic	23,81611
Nilai d/DW	1,562912	Prob (F-Statistic)	0,000987
Nilai t-tabel (6)	2,447	Nilai F-tabel (3,7)	4,35
<b>Hasil Estimasi</b>	<b><math>TKMS_t = 29.805 - 1,10PDRB_t - 7,19BM_t + 0,69PT_t</math></b>		

Sumber : Data di Olah dari Output Eviews-7

Secara serempak/simultan, semua variabel independen/bebas signifikan pada  $\alpha$  5% dengan df numerator  $(k-1) = 3$  dan df denominator  $(n-k) = 7$  karena nilai F-tabel yang sebesar 4,35 lebih kecil dari nilai F-hitung yang sebesar 23,81 dan atau nilai F-hitung  $>$  nilai F-tabel. Selain itu, signifikannya semua variabel bebas terhadap variabel terikat, bisa juga dilihat dari nilai prob (F-statistic) yang sangat kecil (0,000) jika dibandingkan dengan  $\alpha$  5% (0,05). Ini berarti keputusannya adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian, secara serempak/simultan, PDRB, BM, dan PT berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Kabupaten Fakfak, periode tahun 2003-2012.

Kemudian, interpretasi angka koefisien parameter estimasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai koefisien ( $\beta_1$ ) untuk PDRB/pertumbuhan ekonomi yang bertanda negatif, berarti jika nilai PDRB naik sebesar Rp. 1 Milyar saja, maka tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Kabupaten Fakfak akan turun sebesar 1,10% atau turun sebanyak 11 orang/jiwa ( $1,10\% \times 1.000$ ) dengan asumsi variabel BM dan PT tetap.
- Kemudian koefisien ( $\beta_2$ ) untuk BM/Belanja Modal pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang juga bertanda negatif, yang berarti jika nilai BM naik sebesar Rp. 1 Milyar saja, maka tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) akan turun sebesar 7,19% atau turun sebanyak 71,9/72 orang/jiwa ( $7,19\% \times 1.000$ ) dengan asumsi variabel PDRB dan PT tetap.
- Sedangkan koefisien ( $\beta_3$ ) untuk PT yang bertanda positif, yang berarti jika jumlah Pengangguran Terbuka (PT) naik sebanyak 1.000 orang saja, maka tingkat

kemiskinan (jumlah penduduk miskin) juga akan naik sebesar 0,69% atau naik sebanyak 6,9/7 orang/jiwa ( $0,69\% \times 1.000$ ) dengan asumsi variabel PDRB dan BM tetap.

Nilai koefisien determinasi ( $R$ -Squared/ $R^2$ ) yang sebesar 0,922529 (dibulatkan 0,92) atau sebesar 92%, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB, Belanja Modal (BM), dan jumlah Pengangguran Terbuka (PT) secara statistik signifikan dan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (TKMS) atau jumlah penduduk miskin di Kabupaten Fakfak, sedangkan sisanya sebesar 8% di pengaruhi oleh variabel/faktor lain di luar PDRB, BM, dan PT. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas model yang digunakan adalah baik.

Uji Asumsi Klasik, dalam penelitian ini untuk mendeteksi multikolinearitas indikasinya terlihat dari nilai  $R^2$  hasil regresi auxiliary yang dilakukan antar variabel independen dan hasilnya tidak ada multikolinearitas. Selanjutnya, untuk mendeteksi heteroskedastisitas digunakan uji park, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t-statistik < nilai t-tabel ( $\alpha = 5\%$  adalah 2,447) sehingga dapat disimpulkan bahwa didalam model tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson, nilai d hitung atau nilai DW test adalah sebesar 1,562 yang berada diantara  $d_u = 1,54$  dan  $d_u = 2$ , maka kesimpulannya model regresi tersebut tidak mengandung autokorelasi.

Idealnya, peningkatan belanja modal pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dapat memacu upaya peningkatan ketersediaan berbagai infrastruktur daerah yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat/penduduk (termasuk penduduk miskin perdesaan) dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi maupun adanya pergeseran struktur ekonomi masyarakat, bahkan mampu menyediakan lapangan kerja baru (kesempatan kerja) agar jumlah angka pengangguran dapat ditekan dan pendapatan mereka juga bisa mengalami peningkatan sebagai indikator kesejahteraan serta indikator menurunnya tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin), namun fenomena yang terjadi justru bertolak belakang, walaupun ada penurunan tingkat kemiskinan tapi nilainya masih sangat kecil/rendah (bandingkan koefisien parameternya) jika dibandingkan dengan besaran tingginya pertumbuhan ekonomi (PDRB) maupun realisasi belanja modal pemerintah daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Variabel PDRB dan BM baik secara individual maupun serempak, signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Fakfak, sedangkan variabel PT secara individual maupun serempak juga signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, dimana ketiga variabel tersebut diatas secara serempak, signifikan pada  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 melalui uji t dan uji F. Selain itu, angka koefisien determinasi ( $R^2$ ) juga menunjukkan bahwa variasi PDRB, BM, dan PT mampu menjelaskan variabel TKMS sebesar 92% sedangkan sisanya sebesar 8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Sebagai langkah kebijakan, pemerintah daerah Kabupaten Fakfak harus mengurangi anggaran belanja pemerintah daerah yang kurang bahkan tidak bersentuhan

langsung dengan kepentingan publik (masyarakat) dan terus meningkatkan alokasi anggaran khususnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan infrastruktur daerah guna mengurangi keterisolasian masyarakat miskin di perdesaan agar mereka dapat mengakses pasar dan semua kebutuhan yang mereka perlukan. Selain itu, penyediaan infrastruktur daerah juga mendorong adanya peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) berupa tumbuhnya sektor industri baru serta terbukanya kesempatan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa saja terjadi semakin menurunnya tingkat kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deddy S. Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Iskandar Ben Hasan dan Ziskiah, 2009. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penduduk Miskin di Aceh*, Artikel-Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Kutner, M.H., C.J. Nachtsheim., dan J. Neter. 2004. *Applied Linear Regression Models*. 4<sup>th</sup> ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah ; Serial Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. 2006, *Pembangunan Ekonomi*, jilid satu, edisi kesembilan, alih bahasa : Haris Mundandar, Erlangga, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2006, *Ekonomika Pembangunan ; Teori, Masalah, dan Kebijakan*, edisi keempat, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono, 2007. *Statistika untuk Penelitian*, penerbit Alfabeta. Bandung.
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika ; Teori dan Aplikasi*, Edisi Kedua, Penerbit Ekonisia, Fekon UII, Yogyakarta.
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Edisi Kedua, penerbit ; UPP STIM YKPN, Yogyakarta.